

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Aspandi, **Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia Yang Penuh Ketidakpastian**, Lekshi, Surabaya, 2002.
2. Andi Hamzah, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1987.
3. **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
4. Gatot Supramono, **Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum**, Djambatan, Jakarta, 1998.
5. Mangsa Sidabutar, **Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.
6. M. Nur Rasaid, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
7. M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali**, Sinar Grafika, Jakarta, 1982.
8. M. Roeslan Saleh, **Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
9. R. Soesilo, **Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus**, Pholitea, Bogor, 1985.
10. R. Soeroso, **Tata Cara Dan Proses Persidangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
11. S. Tanusubroto, **Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1983.
12. Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sumur, Bandung, 1985

13. Departemen Pendidikan Nasional. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
14. Republik Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
15. Republik Indonesia, Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
16. Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung